

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp12,0 T (830,0%)
▼ -32,9% (yoy)

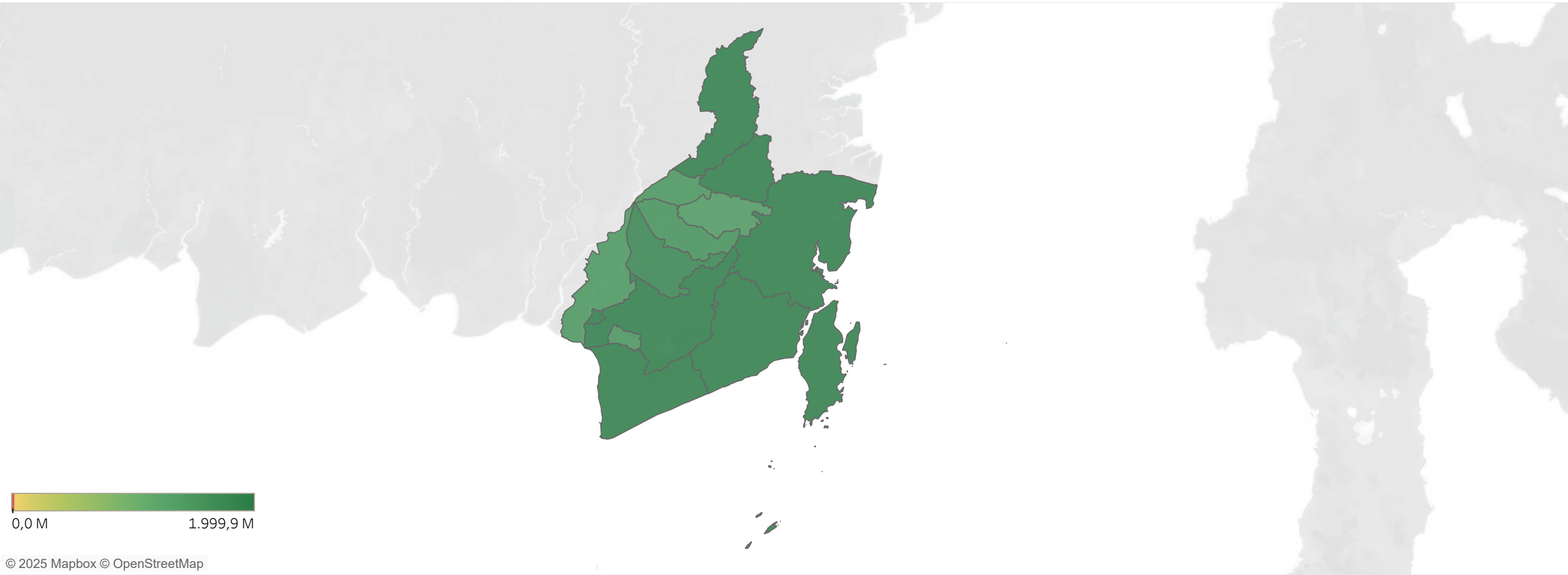
Belanja

Rp36,2 T (87,8%)
▲ 3,5% (yoy)

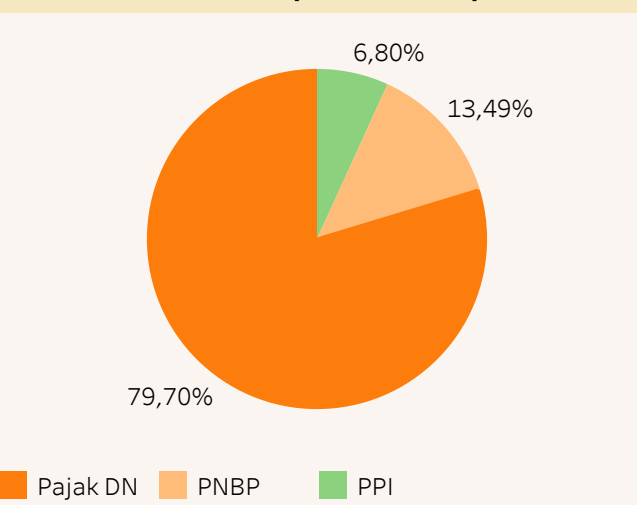
Defisit

Rp-24,3 T (60,9%)
▲ 41,5% (yoy)

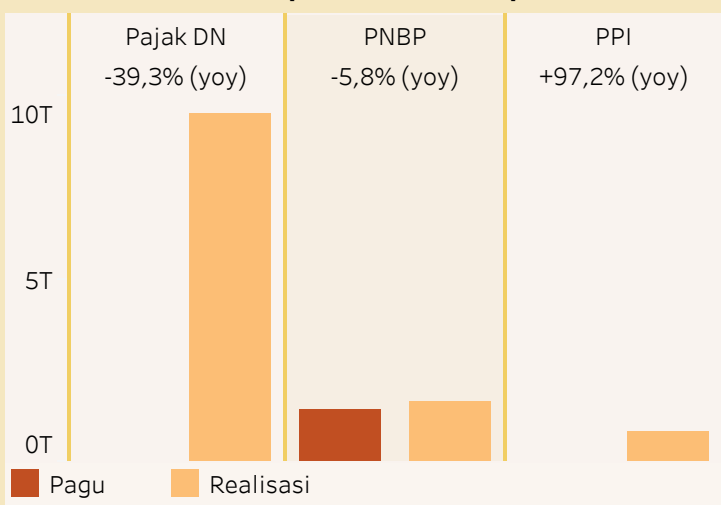
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



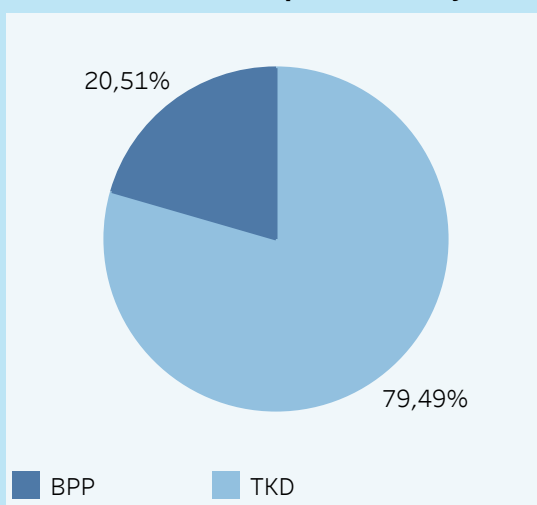
Persentase Komposisi Pendapatan



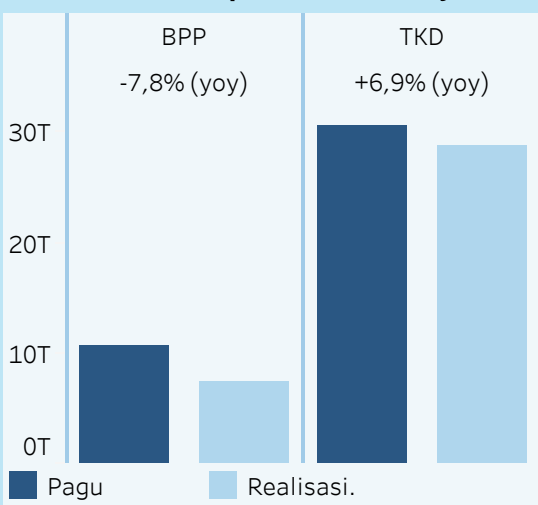
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	17,9T	12,0 T	▼ 32,92%
Grand Total	17,9T	12,0 T	▼ 32,92%

Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	35,0T	84,0%	41,3T	36,2 T	87,8%	▲ 3,54%
Grand Total	41,7T	35,0T	84,0%	41,3T	36,2 T	87,8%	▲ 3,54%

Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi

Pagu (KL) Realisasi (KL)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	44,47%	1,97T	0,88T
KEMENTERIAN AGAMA	100,02%	1,62T	1,62T
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	89,76%	1,48T	1,33T
KEMENTERIAN PERTANIAN	18,56%	1,45T	0,27T
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	73,90%	1,16T	0,86T
KEMENTERIAN PERTAHANAN	92,55%	0,71T	0,65T
MAHKAMAH AGUNG	90,01%	0,30T	0,27T
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	81,50%	0,23T	0,19T
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	69,59%	0,23T	0,16T

5 KL Persentase Realisasi Tertinggi

Pagu (KL) Realisasi (KL)

KEMENTERIAN AGAMA	(100,02%)	1,62T	1,62T
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	(94,66%)	0,20T	0,19T
KOMISI PEMILIHAN UMUM	(94,19%)	0,11T	0,11T
KEMENTERIAN PERTAHANAN	(92,55%)	0,71T	0,65T
MAHKAMAH AGUNG	(90,01%)	0,30T	0,27T

5 KL Persentase Realisasi Terendah

Pagu (KL) Realisasi (KL)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	(0,00%)	0,00T	0,00T
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	(0,00%)	0,00T	0,00T
KEMENTERIAN KOPERASI	(9,45%)	0,02T	0,00T
KEMENTERIAN PERTANIAN	(18,56%)	1,45T	0,27T
BADAN PANGAN NASIONAL	(36,53%)	0,00T	0,00T

Kinerja Belanja KPPN

Pagu (KPPN) Realisasi (KPPN)

BARABAI (94,7%)	5,24T	4,96T
TANJUNG (94,6%)	7,30T	6,90T
KOTABARU (94,4%)	6,17T	5,83T
PELAIHARI (94,0%)	2,29T	2,16T
BANJARMASIN (80,9%)	20,28T	16,40T

Kinerja BPP per KPPN

BARABAI (101,5%)	0,65T	0,66T
TANJUNG (97,8%)	0,63T	0,61T
KOTABARU (87,0%)	0,43T	0,38T
PELAIHARI (87,0%)	0,29T	0,25T
BANJARMASIN (63,4%)	8,73T	

Kinerja TKD per KPPN

PELAIHARI (95,1%)	2,01T	1,91T
KOTABARU (95,0%)	5,74T	5,45T
TANJUNG (94,3%)	6,67T	6,29T
BANJARMASIN (94,1%)	11,56T	10,87T
BARABAI (93,8%)	4,59T	4,30T

HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 28 November 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp11,98 triliun (54,33%) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun, terkontraksi 32,92% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 46,85% (Rp 9,54 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 313,69% (Rp814,85 miliar), serta PNPB mencapai 113,70% (Rp1,62 triliun). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (79,65%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 28 November 2025

1. Kinerja Belanja Negara sebesar Rp36,2 triliun (87,8%) dari pagu Rp41,2 triliun, tumbuh 3,54% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 69,3% (Rp7,43 triliun) dari pagu Rp10,73 triliun, terkontraksi 7,8% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 94,3% (Rp28,82 triliun) dari pagu Rp30,55 triliun, tumbuh 6,9% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (79,49%).

2. Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp1,97 triliun, dengan realisasi mencapai 44,47% (Rp0,88 triliun). Kementerian Agama menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 100,02% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, Kementerian Koperasi menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 9,45% (Rp0,27 triliun) dari pagu Rp1,45 triliun.

3. Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Agama dengan realisasi 100,02% (Rp1,62 triliun) dari pagu Rp1,62 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah oleh Kementerian Koperasi dengan realisasi 9,45% (Rp0,0015 triliun) dari pagu Rp0,015 triliun. Sementara untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan realisasinya masih 0%.

4. Kinerja KPPN, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 94,7% (Rp4,96 triliun) dari pagu Rp5,24 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 80,9% (Rp16,40 triliun) dari pagu Rp20,28 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Capaian penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan s.d. Oktober 2025 baru mencapai 44,57%, rendahnya angka capaian ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga komoditas tambang. Penerimaan pajak pada KPP di wilayah Kalimantan Selatan disumbang oleh sektor administrasi pemerintahan sebagai salah satu sektor terbesar. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang

menyebabkan penyerapan anggaran yang belum optimal sehingga sangat berdampak juga dengan penerimaan.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Perlu langkah strategis berupa diversifikasi basis penerimaan agar tidak terlalu bergantung pada sektor tambang, penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pendataan potensi serta pemanfaatan data pihak ketiga, serta koordinasi dengan instansi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan realisasi belanja yang menghasilkan pajak dalam rangka menutup celah penerimaan yang hilang akibat turunnya harga komoditas dan kebijakan efisiensi anggaran.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Berdasarkan monitoring dan evaluasi satker kewenangan DK/TP, Satker Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan (150060)/Dekonsentrasi telah melakukan pengajuan UP pada awal tahun dengan SP2D tanggal 14 Januari 2025 Nomor 250451302000142 sebesar Rp50.000.000,- dan telah merealisasikan dana UP tersebut, namun Satker tersebut terdampak kebijakan efisiensi pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan terblokir s.d. akhir tahun anggaran, sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban penggunaan UP yang telah dipergunakan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker agar segera melakukan koordinasi dengan eselon I untuk menentukan langkah-langkah dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran sumber dana APBN sehingga pertanggungjawaban dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat peningkatan unit yang dibangun periode sebelumnya 10.076 menjadi 10.413 unit, peningkatan realisasi FLPP periode sebelumnya 9.178 unit menjadi 9.471 unit, peningkatan jumlah lokasi periode sebelumnya 654 lokasi menjadi 664, jumlah kab/kota yang ada program FLPP 13 kab/kota, dan nominal FLPP mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya sebesar Rp1.198.688.107.865,- menjadi Rp1.237.149.832.115,-.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun SIMKOPDES (*microsite*) sebanyak 2.013.
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) mengalami kenaikan periode sebelumnya 544 menjadi 606.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif semula 620 menjadi 684.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis semula 115 menjadi 116.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis semula 364 menjadi 369.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat di Kalimantan Selatan sebanyak 3 SR.

E | Revitalisasi Sekolah, Jumlah target revitalisasi sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 301 sekolah dan seluruhnya telah dikontrakkan, yang terdiri dari Kementerian PU sebagai penanggungjawab 46 madrasah, Kementerian Dikdasmen sebagai penanggungjawab 237 sekolah, dan Kementerian Transmigrasi sebagai penanggungjawab 18 sekolah.

Progres target 46 madrasah, Kementerian PU menargetkan 14 madrasah selesai tahun ini dan sisanya 32 madrasah ditargetkan selesai tahun depan melalui skema *Multi Years Contract* (MYC).

Progres target 18 sekolah, Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Progres target 237 sekolah, Kementerian Dikdasmen menargetkan seluruhnya selesai tahun ini.

Update data revitalisasi sekolah dengan penanggung jawab Kementerian Dikdasmen baru diperoleh dari web Ditjen PDM dan Ditjen Vokasi PKPLK pada tanggal 26 November 2025.

F | SMA Unggul Garuda, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Unggul Garuda Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

G | Ketahanan Pangan, Terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp615,61 M (31,76%) menjadi Rp635,59 M (34,25%) dari pagu sebesar Rp1,86 T.

H | Ketahanan Energi, Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

Dukungan pembangunan infrastruktur oleh pemda untuk mendukung perumahan FLPP masih berjalan lambat. Pemda berperan dalam menyediakan atau mendukung pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) esensial di luar dan di sekitar kawasan perumahan MBR.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Pemda perlu menetapkan prioritas pembangunan PSU yang langsung berdampak pada aksesibilitas dan kelayakan perumahan MBR, disertai alokasi anggaran yang lebih pasti serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti dana *matching fund* atau kerja sama dengan BUMD.

C | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

D | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

KPPN Banjarmasin telah menyalurkan dana sebesar Rp1,4 miliar kepada 206 penerima, dengan rincian Rp1,2 miliar untuk pembayaran honorarium tenaga *Business Assistance* dan sebesar Rp200 juta untuk pembayaran honorarium tenaga *Project Management Officer* (PMO).

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Dukungan pembayaran honorarium tenaga *Business Assistance* dan tenaga PMO diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan koperasi desa, memperkuat tata kelola, serta mendorong koperasi agar semakin produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Telah dilaksanakan kontrak MYC pada tanggal 17 November 2025 untuk pembangunan 3 Sekolah Rakyat di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat agar dipastikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

I | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Terdapat 5 kontrak revitalisasi sekolah (madrasah) oleh satker Kementerian Pekerjaan Umum yang baru ditandatangani tanggal 17 November 2025 (MYC).

J | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Pelaksanaan revitalisasi sekolah (madrasah) agar dipastikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

K | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

L | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikonstruksikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Dengan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan, dikhawatirkan akan menghambat progress pekerjaan Cetak Sawah Rakyat dan Optimalisasi Lahan.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan memanfaatkan alternatif penyelesaian pekerjaan melebihi akhir tahun anggaran (mekanisme RPATA).

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off-grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayup dengan kapasitas 1,6 MW.

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi *mini-grid* atau skema *off-taker* lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG semula 178 menjadi 182, jumlah supplier semula 168 menjadi 206, dan penerima manfaat 469.615 penerima.

Pada Kabupaten Barito Kuala telah dibangun 4 SPPG dan 2 SPPG telah mulai beroperasi dan 2 SPPG ditargetkan beroperasi bulan November.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

3 (tiga) dapur MBG di Kalimantan Selatan ditutup dikarenakan permasalahan menu, penutupan berlangsung hingga seluruh persyaratan pemenuhan standar kelayakan selesai dipenuhi oleh SPPG. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi berbagai dokumen dan fasilitas pendukung diantaranya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat kompetensi juru masak.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Untuk dapat segera beroperasi kembali, SPPG segera menyusun rencana pemenuhan standar dimulai dari percepatan pengurusan dokumen wajib seperti Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat kompetensi juru masak melalui koordinasi intensif dengan dinas kesehatan, BPJPH, dan lembaga sertifikasi kompetensi terkait.